

**Judul** : Komisi VI soal merger BUMN Perkeretaapian, akuisisi diharapkan perkuat pengembangan bisnis  
**Tanggal** : Jumat, 05 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Komisi VI Soal Merger BUMN Perkeretaapian

# Akuisisi Diharapkan Perkuat Pengembangan Bisnis

KOMISI VI DPR menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengakuisisi PT Industri Kereta Api (INKA). Akuisisi diharapkan memperkuat transformasi dan pengembangan bisnis perusahaan pelat merah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya meminta dilakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap rencana PT KAI mengakuisisi PT INKA. Caranya dengan melakukan proses valuasi dan due diligence (proses pemeriksaan) yang komprehensif. Performa INKA saat ini perlu dikaji secara objektif agar sejalan dengan agenda transformasi yang sedang dijalankan PT KAI.

"Jadi akuisisi harus didasarkan pada proyeksi bisnis yang jelas

dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan," tegas Asep di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sebelumnya, Danantara telah memberikan mandat kepada KAI dan INKA untuk melaksanakan proses uji tuntas serta kajian menyeluruh pada 18 Mei 2026. Langkah tersebut untuk memperkuat pasukan sarana perkeretaapian, meningkatkan efisiensi operasional, membangun sinergi jangka panjang, sekaligus memperbaiki fundamental bisnis INKA.

Asep melanjutkan, PT INKA sebagai perusahaan manufaktur perkeretaapian harus mampu memberikan kontribusi maksimal setelah bergabung dengan KAI. Karena itu, proyeksi usaha tidak

hanya dihitung dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

"Harus dipastikan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat. Proyeksi usaha jangan hanya lima tahun, tetapi harus lebih panjang dan terukur," jelas politikus Nasdem ini.

Selain itu, ia meminta tata kelola manajemen, kondisi keuangan, hingga prospek usaha pasca-akuisisi disiapkan secara matang dan transparan. Jangan sampai akuisisi ini justru menjadi beban baru. Karena ekspektasi semua pihak terhadap PT KAI sangat tinggi, baik dari sisi kinerja, transformasi maupun pelayanan. "Jadi seluruh proses harus *clean and clear*,"

tegasnya. Asep juga menyoroti potensi tambahan tugas PT KAI sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan (BUPP). Penambahan tanggung jawab tersebut membutuhkan kesiapan manajemen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan tata kelola yang kuat agar tidak mengganggu agenda transformasi perusahaan.

Asep mengingatkan, jangan sampai transformasi KAI yang selama ini berjalan baik justru terganggu karena muncul beban tambahan yang belum dipersiapkan dengan matang. Untuk itu, manajemen KAI dapat menyiapkan seluruh aspek secara profesional agar penugasan baru yang diterima mampu menjadi pendorong pertumbuhan perusahaan.

"Mudah-mudahan semua agenda korporasi ini dipersiapkan secara proper (layak), sehingga langkah besar yang diambil benar-benar menjadi daya ungkit bagi kemajuan perusahaan ke depan," harapnya.

Anggota Komisi VI DPR Rizal Bawazier menambahkan, DPR telah menerima dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang memuat agenda integrasi PT KAI dan PT INKA. Dokumen tersebut menyebutkan adanya penekanan terhadap proses akuisisi yang ditargetkan berlangsung pada November 2026. "Ini sangat bagus," puji Rizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis

(4/6/2026).

Rizal menilai, penggabungan kedua BUMN tersebut berpotensi memperkuat industri perkeretaapian nasional. Karena, integrasi dalam satu ekosistem bisnis bakal sangat tepat dan saling mendukung. "Tapi, kami mengingatkan agar proses integrasi dilakukan secara hati-hati," harap politikus PKS ini.

Bagaimana tanggapan PT KAI? Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, proses akuisisi merupakan arahan langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan ditargetkan rampung tahun ini. Langkah integrasi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi BUMN yang

tegang didorong Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan pelat merah itu.

"Dalam struktur baru yang disiapkan, KAI akan berperan sebagai perusahaan induk (*holding*), sementara INKA sebagai *subholding*," ujar Bobby di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Bobby berharap, skema tersebut dapat memperkuat sinergi antara KAI sebagai operator transportasi kereta api dengan INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional.

"Dengan integrasi tersebut, koordinasi antara kebutuhan operasional dan pengembangan manufaktur kereta menjadi lebih terarah," tutupnya. ■ TIF